



Perkembangan Sistem Pendidikan di Negara Myanmar

Dewi Sartika Hasibuan ^{1*}, Mislaini Mislaini ², Siti Kholijah Harahap ³

¹⁻³ UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : dewisartika@uinbonjol.ac.id ^{1*}, mislaini@uinbonjol.ac.id ², sitikholijah@uinbonjol.ac.id ³

Abstract, *This article examines the history of the development of the education system in Myanmar, from the pre-colonial era to the modern era. Myanmar has an education system influenced by Buddhist monasteries and British colonialism. The current education system covers elementary to high levels which is managed by the government. However, discrimination against minority groups, particularly Muslims, as well as infrastructure and policy challenges, hinder educational equity. This article also discusses the curriculum structure, levels of education, and the main challenges in equitable education in Myanmar.*

Keywords: Myanmar, education system, history of education, curriculum.

Abstrak, Artikel ini mengkaji sejarah perkembangan sistem pendidikan di Myanmar, mulai dari era pra-kolonial hingga modern. Myanmar memiliki sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh biara Buddha dan kolonialisme Inggris. Sistem pendidikan saat ini mencakup jenjang dasar hingga tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Namun, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, khususnya Muslim, serta tantangan infrastruktur dan kebijakan, menghambat pemerataan pendidikan. Artikel ini juga membahas struktur kurikulum, jenjang pendidikan, dan tantangan utama dalam pemerataan pendidikan di Myanmar.

Kata Kunci : Myanmar, sistem pendidikan, sejarah pendidikan, kurikulum.

1. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Myanmar memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, dan politik. Pada era pra-kolonial, pendidikan di Myanmar didominasi oleh biara-biara Buddha yang berperan sebagai pusat pembelajaran nilai moral dan keterampilan dasar. Selama masa kolonial Inggris, sistem pendidikan sekuler berbasis kurikulum Barat diperkenalkan, tetapi aksesnya terbatas pada kalangan elite. Setelah kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintah berusaha memperluas pendidikan dasar secara nasional. Namun, konflik internal, diskriminasi terhadap minoritas, dan infrastruktur yang terbatas menjadi hambatan utama.

Saat ini, sistem pendidikan Myanmar mencakup jenjang pendidikan dasar hingga tinggi yang diawasi oleh pemerintah melalui beberapa departemen terkait. Kurikulum terdiri dari pendidikan dasar lima tahun, menengah empat hingga enam tahun, dan pendidikan tinggi dengan berbagai program akademik. Meskipun terdapat upaya reformasi sejak awal 2000-an, diskriminasi terhadap komunitas Muslim, ketidakmerataan akses, dan kurangnya kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sistem pendidikan di Myanmar, termasuk perubahan kurikulum, struktur jenjang pendidikan, serta permasalahan pemerataan pendidikan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sejarah dan kebijakan saat ini memengaruhi akses pendidikan di Myanmar, khususnya bagi kelompok minoritas dan wilayah pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi perkembangan sistem pendidikan di Myanmar. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap sejarah, struktur kurikulum, jenjang pendidikan, serta tantangan pemerataan pendidikan. Sumber data primer didapatkan dari literatur yang relevan, dokumen kebijakan pendidikan Myanmar, dan laporan resmi pemerintah. Dan data sekunder diambil dari Artikel jurnal, buku, serta laporan internasional yang membahas diskriminasi dan akses pendidikan di Myanmar. Pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal akademik, laporan kebijakan, dan literatur historis. Serta telaah terhadap dokumen resmi pemerintah Myanmar terkait sistem pendidikan.



Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-interpretatif, yaitu: Mengorganisasikan data ke dalam tema utama (sejarah pendidikan, kurikulum, jenjang pendidikan, dan pemerataan). Dan Menginterpretasikan data untuk menjelaskan hubungan antara sejarah, kebijakan, dan tantangan pendidikan saat ini.

Penelitian ini mengidentifikasi perubahan sistem pendidikan Myanmar melalui periodisasi sejarah dan menilai dampak kebijakan terhadap kelompok minoritas. Masalah diskriminasi dan ketidakmerataan akses pendidikan menjadi fokus utama dalam artikel ini. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika dan tantangan sistem pendidikan di Myanmar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Negara Myanmar

1. Nama Resmi	Pyihtaungsu Thamada Myanma Naingngantaw (Republik Persatuan Myanmar)
2. Ibu kota	Naypydaw

3. Kota Tersebar	Yangon
4. Luas Wilayah	676.578 km ²
5. Kepadatan	+/- 63 Jiwa/km ²
6. Iklim	Musim panas dan musim dingin
7. Penduduk	50 juta jiwa
8. Bentuk Negara	Negara Kesatuan
9. Kepala Pemerintahan	Jendral Senior Than Shwe
10. Kemerdekaan	04 Januari 1948 (Dari Britania Jaya)
11. Agama	Budha mayoritas
12. Bahasa	Birma
13. Lagu Kebangsaan	Kaba Ma Kyei
14. Mata Uang	Kyat (ks)
15. Motto	Gabar Majay Bamar
16. Ekonomi	Beras, hasil pertanian, kayu, hasil laut, mineral dan batuan,
17. Industri utama	Agrobisnis, kehutanan, makanan, dan pertambangan.
18. Bendera	
19. Lambang	

Dilihat dari letak astronomis, Negara Myanmar terletak antara 11 LU-28 LU dan 92 BT-100°BT- dan negara ini di bagian Barat berbatasan dengan Bangladesh, India, dan Teluk Benggala, di bagian Timur berbatasan dengan Laos, Thailand, dan Cina; di bagian Selatan berbatasan dengan Laut Andaman, dan di bagian Utara berbatasan dengan Cina. Wilayah Myanmar masih didominasi oleh areal hutan. Yang dimana Hampir 52% wilayahnya masih

berupa hutan yang banyak menghasilkan kayu. Dan di kawasan dataran rendah banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Secara geografis, Myanmar berada di kawasan Asia Tenggara yang juga termasuk anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN/*Association of Southeast Asian Nations*). (Wicaksana, Nauvarian dan Pramudia:2023).

Myanmar adalah salah satu negara dengan penghasil beras utama di wilayah Asia Tenggara, namun saat ini dengan kemajuan pertanian di berbagai negara, Myanmar menempati urutan keenam sebagai negara penghasil beras di Asia Tenggara. Penduduk Myanmar merupakan keturunan dari ras Mongol, selebihnya adalah keturunan dari India dan Pakistan. Hampir 75% dari penduduk Myanmar bekerja di sektor pertanian dan banyak yang tinggal di desa. Penduduk Myanmar yang tinggal di kota pada umumnya mendiami tiga kota utama, yaitu Yangon, Pagan, dan Mandalay.

Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan di Negara Myanmar

Sistem pendidikan di Myanmar telah berkembang melalui berbagai tahapan sejarah, mulai dari pendidikan berbasis agama di era pra-kolonial, pengaruh sistem Barat selama kolonialisme Inggris, hingga pembentukan sistem modern yang diawasi negara. Sebelum penjajahan Inggris, pendidikan didominasi oleh biara Buddha yang mengajarkan nilai-nilai moral dan keterampilan dasar. Pada masa kolonial, Inggris memperkenalkan pendidikan sekuler berbasis kurikulum Barat, tetapi aksesnya terbatas pada elite masyarakat.

Setelah merdeka pada tahun 1948, pemerintah Myanmar berupaya memperluas pendidikan dasar secara nasional. Namun, konflik politik dan sosial sering menghambat perkembangan sektor ini. Pada era militer, sistem pendidikan dikontrol ketat, termasuk pembatasan kebebasan akademik. Reformasi pendidikan mulai dirancang sejak 2001 dengan rencana pembangunan 30 tahun yang bertujuan meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan.

Sejarah perkembangan sistem pendidikan di Myanmar mencakup beberapa fase penting. Pendidikan formal dimulai dengan pengaruh Inggris pada abad ke-19, yang memperkenalkan model pendidikan Barat. Setelah kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintah berusaha memperbaiki akses pendidikan, namun konflik internal dan ketidakstabilan politik menghambat kemajuan. Saat ini, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan dasar lima tahun, diikuti oleh pendidikan menengah selama enam tahun. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tantangan seperti ketidaksetaraan akses dan kurangnya infrastruktur masih menjadi masalah utama.

Sistem Pendidikan di Myanmar

Pendidikan Sistem pendidikan Burma dijalankan oleh instansi pemerintah dan Departemen Pendidikan. Universitas dan lembaga profesional dari Burma atas dan Burma lebih rendah dijalankan oleh dua entitas yang terpisah, Departemen Pendidikan Tinggi Burma dan Departemen Pendidikan Tinggi Burma Bawah. Markas yang berbasis di Yangon dan Mandalay masing-masing. Sistem pendidikan di Myanmar didasarkan pada sistem Britania Raya, karena hampir satu abad kehadiran Inggris dan Kristen di Burma mengakibatkan Hampir semua sekolah yang dioperasikan pemerintah, tetapi telah terjadi peningkatan baru-baru dibiayai swasta sekolah bahasa Inggris. Sekolah itu adalah wajib sampai akhir sekolah dasar, mungkin sekitar 9 tahun, sedangkan usia wajib belajar adalah 15 atau 16 di tingkat internasional. di Myanmar juga ada 101 universitas, 12 institut Lembaga, 9 perguruan tinggi sederajat, 24 perguruan tinggi negeri serta 146 institusi Pendidikan tinggi.

Kurikulum Pendidikan Myanmar

Kurikulum Pendidikan di Negara Myanmar terdapat empat tahap yang utama dalam sistem Pendidikannya. Sistem sekolah di Myanmar terdiri dari 5 tahun menempuh pada saat Sekolah Dasar, 4 tahun menempuh untuk Sekolah Menengah dan 2 tahun menempuh untuk Sekolah Atas atau sekolah kejuruan. Syarat untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi adalah dengan lulus ujian akhir sekolah yang diadakan oleh sekolah yang bersangkutan . Kemudian terkait pengawasannya, seluruh sekolah pendidikan dasar maupun Perguruan Tinggi berada dibawah pengawasan Departemen Pendidikan. Administrasi dan manajemen pendidikan dasar dilakukan oleh tiga Departemen Pendidikan Dasar dan Departemen Perencanaan dan Pelatihan Pendidikan sesuai dengan arahan dari badan hukum dan organisasi.

Jenjang Pendidikan di Myanmar

Jenjang Pendidikan di Myanmar diantaranya adalah Sub-sektor utama dalam sektor pendidikan yaitu sub-sektor pendidikan dasar dan sub-sektor pendidikan tinggi.

a. Sub Sektor Pendidikan Dasar

1) Pendidikan pra sekolah

Pendidikan dan perawatan anak usia dini (*ECCE*) diartikan sebagai kegiatan yang mengasuh anak di bawah usia 5 tahun secara fisik, sosial, mental dan spiritual, yang mengacu pada kedua program prasekolah (kelompok umur 3-5 tahun) dan membesarkan beragam anak dan tempat penitipan anak ialah program yang beragam yang disediakan untuk anak- anak dari usia 3 tahun. Program *ECCE* ini termasuk pusat

komunitas, rumah dan "lingkaran ibu" berbasis keluarga dan pendidikan orangtua, serta kegiatan *ECCE* terintegrasi.

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah tahap pertama dari pendidikan dasar yang pada prinsipnya adalah wajib. Pendidikan dasar ini berlangsung selama lima tahun, yang mana termasuk tahun penerimaan (TK atau kelas 1) itu sendiri. Dan diselenggarakan dalam dua siklus: tingkatan yg lebih rendah pada (kelas 1 sampai 3), dan primer atas pada (kelas 4 dan 5). Usia masuk pendidikan dasar adalah +5, tetapi meskipun banyak anak yang masuk kelas I lebih dari 6 tahun. Pada akhir pendidikan dasar, peserta didik harus mengikuti ujian.

3) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah ialah tahap kedua dari pendidikan dasar yang terdiri dari dua siklus: Sekolah menengah pertama yang berlangsung empat tahun pada (kelas 6-9), dan sekolah menengah atas pada (kelas 10-11). Pada akhir pendidikan menengah, siswa harus menjalani Ujian Pendidikan dasar Sekolah Menengah. Puncak program pendidikan dasar ialah Ujian Pendidikan Tinggi (matrikulasi). Pendidikan teknis dan kejuruan ditawarkan dalam lembaga pertanian dan SMA, sekolah teknik tinggi, sekolah kejuruan dan perdagangan.

b. Sub Sektor Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Myanmar, terdapat 64 lembaga yang sebagian besar berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan sementara itu 92 lagi lembaga berada di bawah 11 kementerian lain dan Publik Jasa Seleksi serta Publik Jasa Pelatihan. Seluruh Sekolah pendidikan tinggi ditanggung oleh negara.

Lembaga pendidikan tinggi menekankan diri dalam berbagai bidang seperti seni dan sains, hukum, pendidikan ekonomi dan bisnis, pendidikan guru, bahasa asing, teknik, ilmu komputer, ilmu kelautan, pertahanan, pertanian, kehutanan, ilmu kedokteran hewan, dan budaya dan seni, dan lain-lain, serta menawarkan berbagai program-sarjana, diploma pascasarjana, program gelar master beserta doktor.

Lembaga pendidikan tinggi di bawah Departemen Pendidikan juga telah mendirikan pusat untuk pengembangan sumber daya manusia yang menawarkan pendidikan ulang dan mempertahankan program pengembangan sumber daya manusia mulai dari program sertifikat jangka pendek untuk program gelar master.

Ada dua departemen Pendidikan tinggi yang bertanggung jawab atas administrasi dan koordinasi untuk lembaga pendidikan tinggi di bawah Departemen Pendidikan, meskipun perguruan tinggi berada di bawah administrasi kementerian yang berbeda, masalah kebijakan akademik dan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang dikelola oleh dua dewan yang dipimpin oleh menteri Pendidikan.

- Dewan Sentral Universitas
- Dewan Akademik Universitas

Dewan Pusat Universitas bertanggung jawab terhadap perumusan kebijakan umum serta koordinasi pekerjaan lembaga pendidikan tinggi, sementara tanggung jawab Dewan Akademik Universitas bertanggung jawab terhadap penerapan peraturan akademik beserta koordinasi kerja akademik.

1) Pendidikan tinggi

Pendidikan tingkat tinggi adalah pendidikan bagi siswa yang sudah melewati pendidikan dasar dan telah lulus ujian masuk. Perguruan tinggi termasuk universitas, lembaga teknis dan perguruan tinggi berada di bawah pengawasan beberapa departemen terutama Pendidikan, Kesehatan, dan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Lulusan sekolah menengah atau tinggi atas dapat bergabung ke lembaga teknis selama dua tahun untuk mendapatkan penghargaan dari lembaga teknis pemerintah perguruan tinggi teknologi dan universitas menawarkan program dua tahun yang mengarah ke program empat tahun yang mengarah ke Pasca sarjana teknologi, dan program lima tahun kelompok yang mengarah ke Pasca Sarjana Teknik.

Pendidikan tinggi juga menyiapkan berbagai macam kursus. pelatihan singkat yang berlangsung beberapa bulan untuk mendapatkan sertifikat. Di tingkat universitas, dimana program gelar sarjana biasanya membutuhkan tiga tahun hingga lulus dari universitas empat tahun untuk hukum, enam tahun untuk sarjana Kedokteran dan gelar sarjana kehormatan diberikan setelah satu tahun tambahan studi. Ijazah pasca sarjana membutuhkan satu atau dua tahun tambahan untuk menyelesaikan kuliahnya, sementara itu program yang mengarah ke gelar master biasanya berlangsung selama dua tahun. Program untuk mendapatkan gelar doktor membutuhkan setidaknya empat tahun studi dan penelitian.

Masalah Pemerataan Pendidikan di Indonesia dan Myanmar

Masalah Pemerataan Pendidikan di Myanmar Komunitas Muslim masih tertinggal dalam akses pendidikan utama di negara Myanmar. Sebagian karena kebijakan diskriminatif negara terhadap etnis minoritas dalam mengakses hak-hak dasar, yang menyebabkan

penurunan substansial status mereka di masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh diskriminasi, di mana umat Islam sering menghadapi pembatasan hak mereka atas pendidikan.

Sementara itu, Muslim sendiri dikritik karena tidak bekerja sama dengan pemerintah untuk menyekolahkan anak mereka ke pendidikan formal yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah yang dikelola negara, terutama yang diakui secara hukum bagi warga negara Myanmar. Kebanyakan orang tua Muslim masih tidak memilih untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah umum di mana kurikulum pengajaran tidak berafiliasi dengan agama atau keyakinan tertentu. kecuali Buddhisme.

Perbandingan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia dan Negara Mnyanmar

Perbandingan system Pendidikan Indonesia dan mnyanmar dapat dilihat dari beberapa aspek utama seperti struktur Pendidikan, kebijakan pemerintah, tsntsngsn, serta perkembangan teknologi.

ASPEK	INDONESIA	MNYANMAR
1. Struktur Sistem Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pendidikan terdiri dari jenjang PAUD, SD (6 tahun), SMP (3 tahun), dan Pendidikan Tinggi • Program wajib belajar 12 tahun di terapkan secara nasional • Kurikulum berfokus pada Pendidikan karakter, literasi, dan kompetensi abad ke-21. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pendidikan juga mencakup Pendidikan dasar (5 tahun), Pendidikan menengah pertama (4 tahun), Pendidikan menengah atas (2 tahun), dan Pendidikan tinggi • Program wajib belajar hanya mencakup pendidikan dasar, belum mencakup tingkat menengah atas.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum lebih berfokus pada hafalan dan penguasaan akademik, dengan sedikit penekanan pada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif.
2. Akses Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah memberikan dukungan melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. • Akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan, tetapi perlahan diperbaiki melalui pembangunan infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan di daerah pedesaan dan konflik masih sangat terbatas. • Banyak anak putus sekolah karena faktor ekonomi, konflik, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.
3. Pemerintah dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah aktif meningkatkan kualitas pendidikan melalui program sertifikasi guru, pembangunan fasilitas sekolah, dan peningkatan kurikulum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Myanmar mengalami keterbatasan anggaran untuk pendidikan. • etelah reformasi politik, ada peningkatan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan berbasis agama juga berkembang melalui pesantren dan madrasah. 	<p>investasi pada sektor pendidikan, tetapi kemajuannya lambat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh militer dalam politik sering menghambat perkembangan kebijakan pendidikan yang inklusif.
4. Teknologi dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan berbasis teknologi berkembang pesat, terutama setelah pandemi COVID-19 • Platform e-learning seperti Ruangguru dan digitalisasi sekolah mulai diterapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi dalam pendidikan masih minim karena infrastruktur internet yang terbatas. • Pandemi COVID-19 menunjukkan ketidaksiapan Myanmar untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
5. Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan kualitas Pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. • Kurikulum sering mengalami perubahan, sehingga menciptakan kebingungan bagi tenaga pendidik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik internal dan ketidakstabilan politik sering menyebabkan anak-anak kehilangan akses pendidikan. • Kurangnya tenaga pendidik berkualitas di daerah terpencil.

6. Peran Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif dalam kerja sama internasional, seperti program pertukaran pelajar, beasiswa luar negeri, dan adopsi standar pendidikan global. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pendidikan sering mendapat dukungan dari lembaga internasional, seperti UNICEF, tetapi implementasinya lambat.
------------------------	---	--

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai perkembangan sistem pendidikan di Myanmar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sistem pendidikan di Myanmar telah melalui berbagai perubahan sejak era pra-kolonial hingga masa pasca-kemerdekaan, dengan pengaruh besar dari penjajahan Inggris. Setelah kemerdekaan pada tahun 1948, Myanmar berupaya memperluas akses pendidikan dasar secara nasional, meskipun tantangan besar seperti konflik internal, ketidakstabilan politik, dan pembatasan kebebasan akademik selama era militer menghambat perkembangannya. Sistem pendidikan di Myanmar terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dengan struktur yang mirip dengan sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh Inggris.

Meskipun pemerintah Myanmar telah merancang berbagai reformasi pendidikan sejak 2001, kualitas dan akses pendidikan di negara ini masih menghadapi banyak kendala, termasuk ketidaksetaraan akses antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta masalah diskriminasi terhadap kelompok etnis minoritas, khususnya komunitas Muslim yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Myanmar, masalah-masalah struktural dan diskriminasi yang ada memerlukan perhatian lebih lanjut agar pendidikan dapat lebih merata, inklusif, dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasyah, Shafa. STUDI PERBANDINGAN KURIKULUM DI NEGARA ASEAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952, 1967.
- Asril Gunawan, 2013, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingnya di Myanmar, *Ilmu Hukum Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

- Gartner, Uta. 2011. Pendidikan Di Myanmar Abstrak Singkat Kebijakan Pendidikan. Jerman: Universitas Passau.
- Lai, L. (2015). Reformasi pendidikan di Myanmar pasca-2011. *Southeast Asian Education Review*, 29(2), 12-23.
- Ministry of Education. 2004. Education in Myanmar. Myanmar: The Government of the Union Myanmar.
- Miraj News 2014. <http://mirajnews.com/id/artikel/feature/urgensi-reformasi-pendidikan-di-myanmar>. Diakses 24 Januari 2015.
- Sukoharjo saifullah, 2010, sejarah dan kebudayaan islam di asia tenggara, pustaka pelajar, indonesi
- Syakhriani, Abdul Wahab. "Perbandingan Pendidikan." *Educatioanl Journal: General and Specific Research* 2, no. 3 (2022): 419-432. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/download/183/187>.
- UNESCO. 2011. World Data On Education 7th Edition.
- Win, H. T. (2017). Perkembangan sistem pendidikan tinggi di Myanmar. *Myanmar Journal of Education*, 8(3), 120-130.
- Win, H. T. (2017). Perkembangan sistem pendidikan tinggi di Myanmar. *Myanmar Journal of Education*, 8(3), 120-130.